

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan, atau merebut kekuasaan dari laki-laki, melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi mitra sejajar laki-laki. Sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan, penting untuk membahas isu keterlibatan perempuan. Kelompok feminis percaya bahwa tidak mungkin laki-laki membawa kepentingan bagi perempuan, karena perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan serta pandangan yang berbeda.¹ Dalam kondisi demikian, partisipasi politik perempuan bertujuan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan politik.

Terdapat beberapa alasan terkait pentingnya perempuan berpartisipasi dalam politik. Pertama, alasan keadilan dan kesetaraan. Mengingat perempuan berjumlah hampir 50% lebih dari populasi dunia, sehingga penting untuk perempuan memiliki keterwakilan yang sama dengan laki-laki. Kedua, alasan kepentingan perempuan. Hal ini berangkat dari pemahaman yang salah dari kebanyakan masyarakat secara umum bahwa perempuan hanya melakukan kegiatan dalam ranah privat, sedangkan urusan publik menjadi tanggung jawab laki-laki. Akibatnya, mayoritas kebijakan publik yang berdampak pada perempuan biasanya dibuat oleh laki-laki. Alasan ketiga yang tidak kalah penting

¹ Philips, Anne. (1991). *Engendering Democracy*. Cambridge : Polity Press. Hlm.63.

adalah "emansipasi", yang merupakan tuntutan sejarah bagi perkembangan dan kemajuan negara, masyarakat dan bangsa, dan juga syarat transisi perubahan ke arah yang lebih demokratis melalui partisipasi perempuan. Oleh karena itu, dalam kehidupan negara yang demokratis peran perempuan harus dijalankan, sehingga berdampak pada peraturan yang dibuat memiliki perspektif perempuan dan lebih representatif.²

Keterlibatan perempuan dalam politik dapat terlihat dari beberapa tokoh perempuan dunia yang mampu menjadi pemimpin, seperti Indira Gandhi di India, Cory Aquino di Filipina, dan Margareth Thatcher di Inggris.³ Di Indonesia, perjuangan sosok R.A. dapat dirasakan dengan adanya gerakan emansipasi wanita. Kini, posisi perempuan sebagai pemimpin sudah mulai dihargai dan diperlakukan setara. Sejalan dengan gerakan pembebasan dan gerakan kesetaraan gender yang intinya menuntut persamaan hak perempuan di segala bidang kehidupan, persepsi tentang citra perempuan berangsur-angsur berubah. Dalam sejarah Indonesia, Megawati Soekarno Putri berhasil menjadi salah satu pemimpin Indonesia. Ini jelas menunjukkan bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin, apalagi pimpinan sebuah negara.⁴

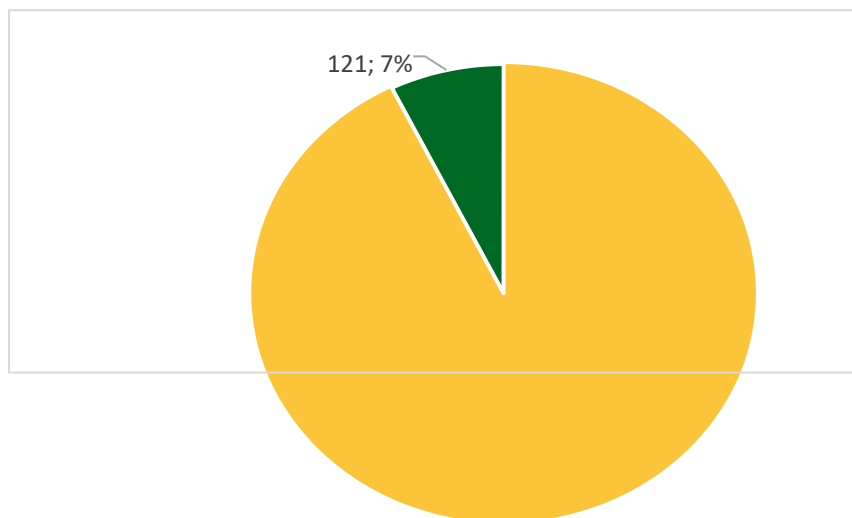
² Pratama, Youngky Andre., Iwan Rachmat Soetijono, dan Gautama Budi Arundhati.(2013). Hak-Hak Politik Perempuan dalam Lembaga Legislatif dalam Menghadapi Pemilu 2014 di Indonesia Ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*. Universitas Jember. Hlm.2.

³ Yulianti, Reny., Dedy Dwi Putra, dan Paulus Diki Takanjanji. (2018). Women Leadership : Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin. *Jurnal Politik dan Sosial Masyarakat, Vol.10, No.2*. Hlm.24.

⁴ Sasmita, Jumiati., dan Said As'ad Raihan. (2014). Kepemimpinan Pria dan Wanita, Towards a News Indonesia Business Architecture. Hlm.22

Hal tersebut juga sejalan dengan adanya partisipasi pemimpin perempuan ditingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Sebagai contoh, dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 atau yang selanjutnya disingkat menjadi Pilkada, diikuti oleh 828 pasangan atau 1.656 calon dan tersebar di sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota. Berdasarkan angka tersebut, seperti terlihat pada gambar 1.1, hanya 121 orang atau setara 7,3 persen yang berasal dari kalangan perempuan. Hal ini menandakan bahwa partisipasi politik perempuan untuk menjadi seorang kepala daerah masih sangat rendah dan jauh. Secara tidak langsung, hal ini menggambarkan bahwa politik di tingkat lokal masih di dominasi oleh kaum laki-laki.

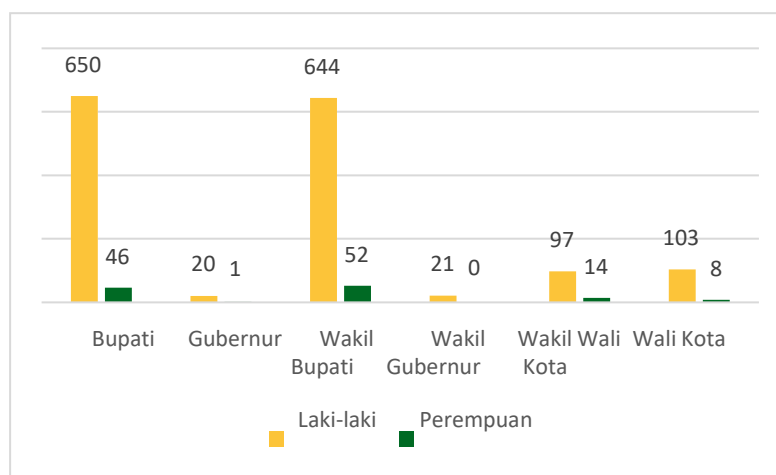
Gambar 1.1
Persentase Calon Perempuan dan Laki-Laki di Pilkada 2015



Sumber : Desk Perempuan dan Politik, Departemen Politik, Demokrasi dan Desa (PDD) Yayasan Satunama.⁵

Selanjutnya, pada gambar 1.2 terlihat bahwa dari tujuh persen perempuan yang berpartisipasi, mayoritas perempuan maju sebagai wakil bupati (52 orang). Selain itu, untuk poisis bupati sebanyak 46 orang perempuan, wakil walikota sebanyak 14 orang perempuan, 8 orang untuk posisi wali kota dan hanya satu orang perempuan gubernur. Angka ini cukup berbanding terbalik jika dibandingkan dengan calon laki-laki, yaitu gubernur 20 orang, wakil gubernur 21 orang, wali kota 103 orang, wakil wali kota 97 orang, bupati 650 orang dan wakil bupati 644 orang.

Gambar 1.2.
Kandidat Calon Perempuan dalam Pilkada Serentak 2015

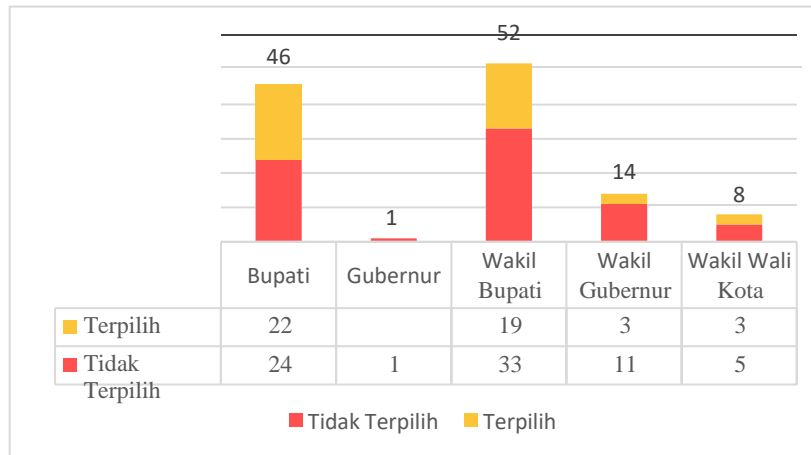


Sumber : Desk Perempuan dan Politik, Departemen Politik, Demokrasi dan Desa (PDD) Yayasan Satunama.⁶

⁵ Qomariya, Nunung., Insan Kamil, dan Any Sundari. (2016). *Kajian Perempuan di Pilkada Serentak 2015 : Perspektif Perempuan dan Lingkaran Kekuasaan di Sekitaran Calon Perempuan Peserta Pilkada*. Yogyakarta : Yayasan Satunama. Hlm.23.

⁶ Qomariya, Nunung., Insan Kamil, dan Any Sundari. (2016). *Kajian Perempuan di Pilkada Serentak 2015 : Perspektif Perempuan dan Lingkaran Kekuasaan di Sekitaran Calon Perempuan Peserta Pilkada*. Yogyakarta : Yayasan Satunama. Hlm.25.

Gambar 1.3
Posisi Keterpilihan Perempuan di Pilkada Serentak 2015



Sumber : Desk Perempuan dan Politik, Departemen Politik, Demokrasi dan Desa (PDD) Yayasan Satunama.⁷

Berdasarkan gambar 1.3, dari total perempuan yang mencalonkan diri, hanya 47 perempuan atau sebanyak 38,8 persen yang terpilih dan tersebar di enam kota dan 40 kabupaten. Dari semua perempuan tersebut, perempuan yang menduduki jabatan bupati sebanyak 22 perempuan, wakil bupati 19 perempuan, wakil walikota dan wali kota 3 orang perempuan. Lebih lanjut, salah satu kepala daerah perempuan yang terpilih dalam pilkada serentak 2015 adalah bupati Sri Sumarni di Kabupaten Grobogan.

Pada 2015, Sri Sumarni dan Edy Maryono menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan dan melawan calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Icek Baskoro dan Sugeng Prasetyo. Dilihat dari hasil pemilihan umum, pasangan pertama Icek Baskoro dan Sugeng Prasetyo memperoleh 184.725 suara atau 26,90 persen, sedangkan pasangan kedua Sri Sumarni dan Edy Maryono memperoleh

⁷ Ibid. Hlm. 54.

501.941 suara atau 73,10 persen. Oleh karena itu, Sri Sumarni dan Edy Maryono terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan periode 2016-2021.⁸

Sebagai seorang kepala daerah perempuan, Sri Sumarni memiliki gagasan untuk memperkuat praktik gender. Di lansir dari <https://grobogan.go.id/>, dalam rangka memperingati Hari Kartini 2017, Sri Sumarni mengajak perempuan untuk bangkit dan berkarya. Perempuan bisa meraih prestasi yang sama dengan pria di segala bidang. Termasuk di bidang politik, perempuan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Selain itu, Sri Sumarni menegaskan bisa membuktikan hal tersebut, yakni namanya perempuan pertama yang bisa menjadi Bupati Grobogan. Sebelumnya, Ia juga menjabat sebagai Ketua DPRD Grobogan.⁹

Pernyataan Sri Sumarni sebagai pemimpin kepala daerah perempuan sejalan dengan apa yang dilakukannya. Di lansir dari <https://grobogan.go.id/>, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganugerahi Bupati Grobogan Sri Sumarni sebagai aktivis pemberdayaan perempuan. Bupati Sri Sumarni mengatakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian warga adalah dengan menggerakkan perempuan khususnya ibu rumah tangga untuk menghasilkan berbagai produk. Di antaranya, produk masakan, batik tulis, kerajinan tangan, dan *ecoprint*.¹⁰

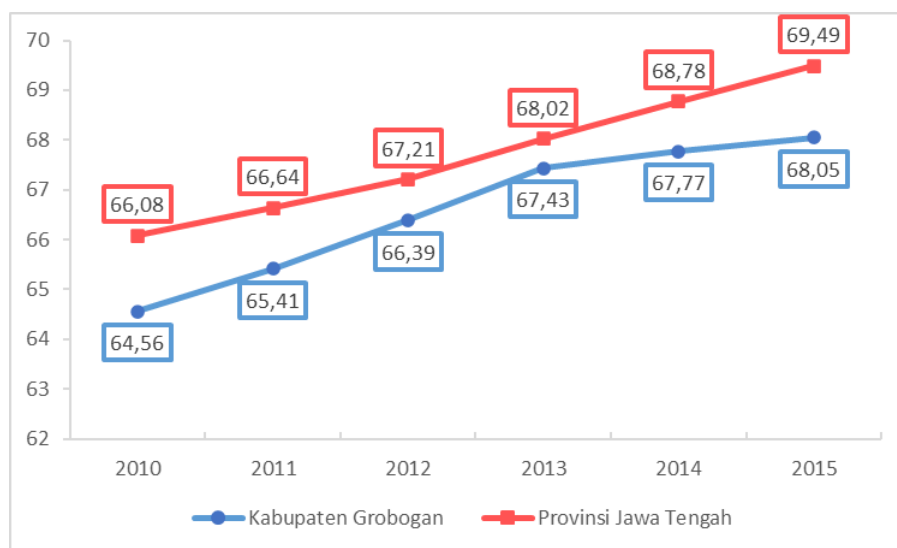
⁸ Website Resmi KPUD Kabupaten Grobogan (<https://kpud-grobogankab.go.id/> diakses pada tanggal 9 januari 2020 pukul 19.30 WIB).

⁹ Website Resmi Pemerintah Kabupaten Grobogan (<https://grobogan.go.id/> diakses pada tanggal 14 Januari 2021 pukul 20.00 WIB).

¹⁰ Website Resmi Pemerintah Kabupaten Grobogan (<https://grobogan.go.id/> diakses pada tanggal 14 Januari 2021 pukul 21.00 WIB).

Sebagai pemimpin kepala daerah perempuan, Sri Sumarni sudah semestinya membawa kepentingan perempuan. Salah satu tolok ukur pemberdayaan perempuan adalah dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah angka yang dipakai untuk melihat kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di suatu wilayah. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah dalam pembangunan manusia. IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).¹¹ Indikator yang membentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian.¹² Perkembangan IPM di Kabupaten Grobogan di masa kepemimpinan kepala daerah sebelum Ibu Sri Sumarni menjabat menunjukkan peningkatan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan IPM Jawa Tengah, IPM Kabupaten Grobogan masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut berdasarkan gambar berikut:

Gambar 1.4
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Grobogan Tahun 2010 -2015



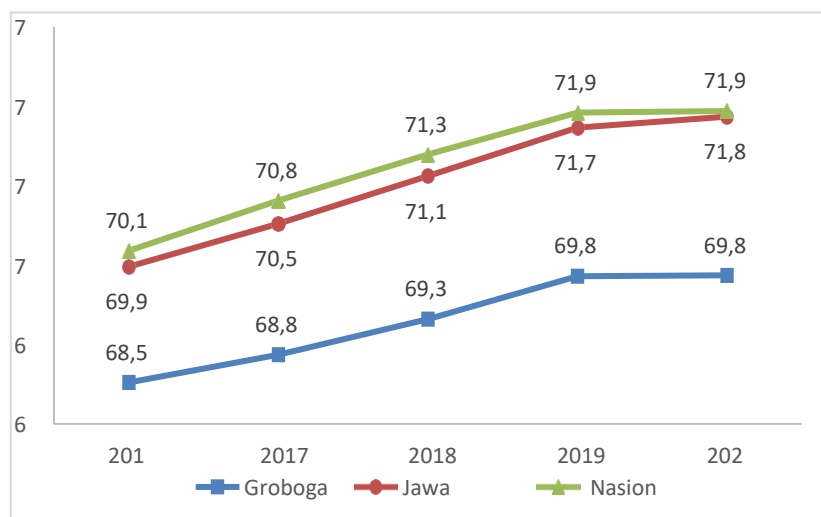
Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2015.

¹¹ Sari, Uni., Harianto, dan A Faroby Falatehan. (2016). Strategi Meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) Melalui Alokasi Anggaran Kesehatan di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Vol. 8, No.1.Hlm,30.

¹² Dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, Bab II,Hlm.22

Perkembangan IPM saat Ibu Sri Sumarni menjabat mengalami peningkatan setiap tahun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 68,52 meningkat menjadi 68,87 pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan kategori sedang karena masih berada di bawah angka 70. Peningkatan capaian IPM Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2020 relevan terhadap peningkatan IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.5
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

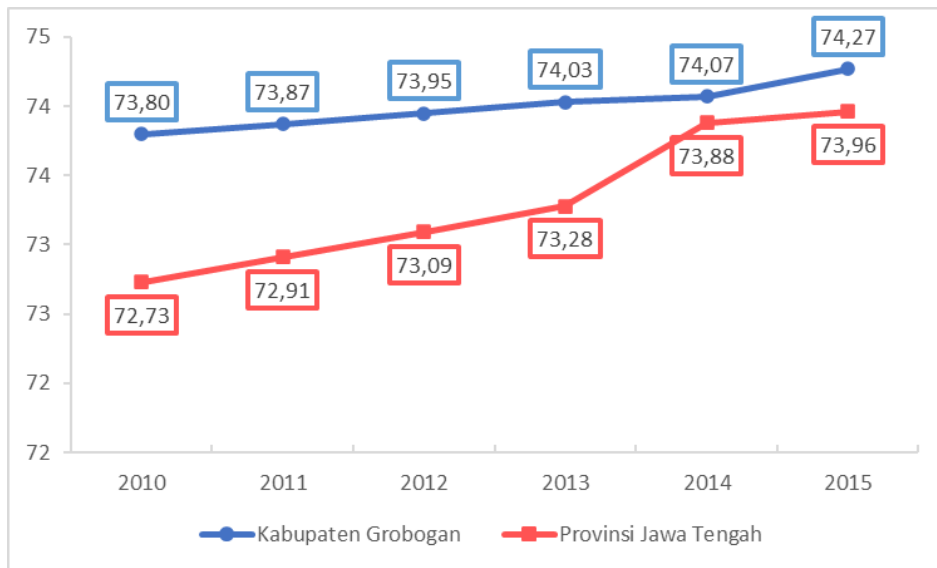


Sumber : BPS Nasional Tahun 2021.

Salah satu komponen IPM adalah kesehatan dengan indikatornya yaitu Angka Harapan Hidup. AHH merupakan prediksi rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat ditempuh oleh seseorang. AHH merupakan variabel penting untuk melihat taraf kesehatan masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan hasil pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Perkembangan AHH di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2015) Grobogan di masa kepemimpinan kepala daerah sebelum Ibu Sri Sumarni menjabat menunjukkan

peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

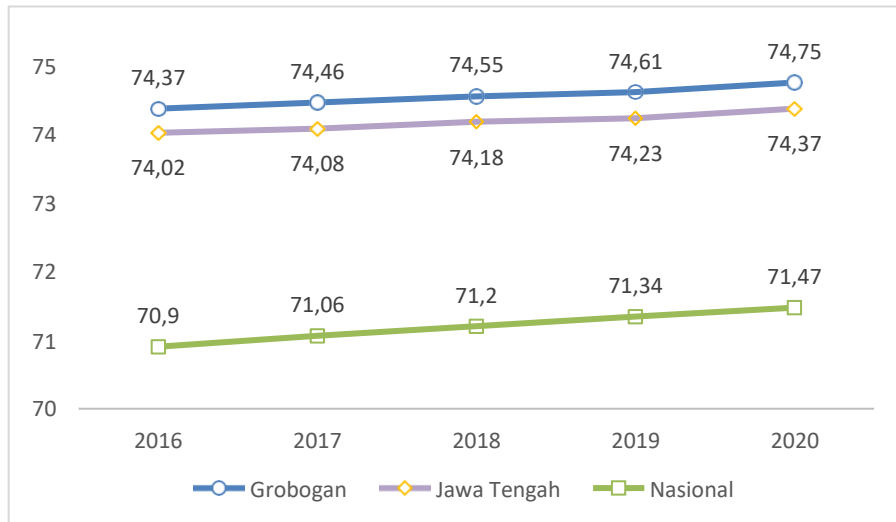
Gambar 1.6
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Grobogan Tahun 2010 – 2015



Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2015.

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan saat Ibu Sri Sumarni menjabat mengalami peningkatan setiap tahun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 74,37 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 74,75 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.7
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten
Grobogan Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Nasional Tahun 2021.

Angka Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Oleh karena itu, hal yang bisa diupayakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat adalah dengan memberikan anggaran untuk pembiayaan pelayanan kesehatan. Alokasi anggaran kesehatan dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup. Rencana Alokasi Anggaran Kesehatan Kabupaten Grobogan tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rencana Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
Tahun 2016 – 2021

No.	Tahun	Rencana Alokasi Anggaran
1.	2016	Rp. 162.799.545,2
2.	2017	Rp. 117.436.039
3.	2018	Rp. 276.308.549,6
4.	2019	Rp. 375.173.839,6
5.	2020	Rp. 882.906.026
6.	2021	Rp. 1.013.178.130

Sumber : Diolah dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021.¹³

Dengan adanya jumlah anggaran yang besar, serta penggunaan anggaran yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan manusia di wilayah tersebut dapat berjalan dengan indikator peningkatan angka harapan hidup. Maka dari itu, penulis melihat kebijakan dan belanja daerah yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Grobogan di bawah kepemimpinan Sri Sumarni (periode 2016 – 2021) dalam rangka meningkatkan Angka Harapan Hidup.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana Kinerja Kepemimpinan Bupati Sri Sumarni di Kabupaten Grobogan Periode 2016-2021 dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja Sri Sumarni sebagai pemimpin kepala daerah perempuan pertama di Grobogan dengan melihat kebijakan dan belanja daerah dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup.

¹³ Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021, Hlm 131-150.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan keilmuan pada umumnya dan khususnya bagi ilmu pemerintahan.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
- c. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan daerah

1.4.2 Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti dapatkan dan pelajari dalam perkuliahan di kelas.
- b. Bagi Instansi, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi instansi terkait sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
- c. Bagi Pihak Lain, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dengan referensi bacaan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sejenis.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibangun berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian mengenai kinerja kepemimpinan perempuan banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian dari Widya Ayu (2017) dengan judul "*Analisis Kebijakan Luar Negeri Taiwan New Southbound Policy Di Era Kepemimpinan Tsai Ing-Wen Pada Tahun 2016*". Dalam penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pada 2016, Taiwan memiliki presiden wanita pertama yang bernama Tsai Ing-wen. Pada hari upacara pelantikan pada 20 Mei 2016, Presiden Tsai mengumumkan *New Southbound Policy* sebagai salah satu kebijakan luar negeri Taiwan. Bekerja sama dengan 18 negara di ASEAN, Asia Selatan, Selandia Baru dan Australia, kebijakan ini merupakan salah satu strategi perdagangan dan investasi Taiwan. Uniknya, implementasi kebijakan ini tidak terbatas pada masalah perdagangan dan investasi, tetapi juga mencakup masalah kesehatan, pariwisata, budaya, imigrasi, pendidikan, dan teknis.¹⁴

Selain itu, penelitian Widya Ayu (2017) juga memperlihatkan kebijakan Presiden Tsai berbeda dengan kebijakan para pemimpin Taiwan sebelumnya karena kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada China secara bertahap. Dalam membahas *New Southbound Policy*, penulis menggunakan konsep proses pengambilan keputusan William D. Coplin. Konsep ini mencakup empat variabel, yang akan menjelaskan faktor determinan terbentuknya *Taiwan New Southbound Policy*, termasuk kondisi politik domestik,

¹⁴ Ayu, Widya. (2017). Analisis Kebijakan Luar Negeri Taiwan New Southbound Policy di Era Kepemimpinan Tsai Ing-Wen pada Tahun 2016. *Tesis*. Universitas Brawijaya.

kondisi ekonomi dan militer, lingkungan internasional, dan pengambil kebijakan. Berdasarkan keempat variabel tersebut, analisis kebijakan luar negeri *Taiwan New Southbound Policy* di era kepemimpinan Presiden Tsai Ing-Wen pada tahun 2016 dapat dilihat dari kondisi politik dalam negeri Taiwan dan kondisi ekonomi Taiwan.¹⁵

Selanjutnya, penelitian dari Indah Rizki Aruma Nurjannah (2017) memaparkan terkait kepemimpinan presiden pertama perempuan di Indonesia. Judul dari penelitian Indah Rizki A. N. (2017) adalah "*Kebijakan Politik Presiden Megawati Tahun 2001-2004*". Hasil penelitian yang diperoleh adalah perjalanan praktik politik Megawati, dimulai dari dirinya sebagai kader PDI, kemudian sebagai penggerak perolehan suara, menjadi anggota DPR dan menjadi kekuatan tertinggi partai PDI. Tahun 2000 adalah awal dari perjalanan politik yang nyata. Pengangkatan Megawati sebagai wakil presiden ke delapan Republik Indonesia merupakan prestasi tersendiri bagi Megawati. Pada 2001, Megawati menjadi presiden ke lima dengan dimakzulkannya Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan.¹⁶

Simpulan dari penelitian Indah Rizki Aruma Nurjannah (2017) adalah selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Megawati banyak melakukan perubahan, meskipun perubahan tersebut tidak terlalu besar, namun menjadi awal dari landasan politik Indonesia yaitu kebijakan dalam dan luar

¹⁵ Ayu, Widya. (2017). Analisis Kebijakan Luar Negeri Taiwan New Southbound Policy di Era Kepemimpinan Tsai Ing-Wen pada Tahun 2016. *Tesis*. Universitas Brawijaya.

¹⁶ Nurjannah, Indah Rizki Aruma. (2017). Kebijakan Politik Presiden Megawati Tahun 2001-2014. *Skripsi*. Universitas Jember.

negeri yang kesemuanya hampir berpusat pada politik. Salah satunya adalah stabilitas nasional, dan langkah terpenting adalah pemberantasan korupsi dengan membentuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) serta mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk melindungi setiap kebijakan nasional.¹⁷

Penelitian selanjutnya, penelitian dari Vivi Alvionita (2017) memaparkan terkait kepemimpinan perempuan di tingkat daerah. Judul dari penelitian Vivi Alvionita (2017) adalah "*Gender dan Kepemimpinan Pemerintahan di Kabupaten (Studi kasus pada Kepemimpinan Bupati Chusnunia Chalim di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016)*". Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Chusnia Chalim merupakan kepala daerah perempuan pertama di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, bahkan Sumatera. Di awal kepemimpinannya, Chusnia Chalim mendirikan rumah ramah anak untuk memperhatikan hak-hak anak Lampung Timur. Oleh karena itu, dari perspektif gender, kepemimpinan perempuan merupakan isu penting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di ranah publik membawa manfaat. Pertama, dari sisi prioritas dan hasil politik, isu sosial telah menjadi salah satu isu yang diangkat oleh kepemimpinan perempuan. Kedua, perubahan praktik dan perilaku politik, yaitu kecenderungan praktik nepotisme dalam arti membesarkan anggota keluarga, kerabat, atau teman dekat, seringkali tidak signifikan dalam kepemimpinan perempuan. Ketiga, respon yang baik terhadap kebutuhan wanita.

¹⁷ Ibid.

Keempat pemerintah menanggapi kebutuhan masyarakat. Kelima, demokrasi dan pemerintahan berkembang ke arah yang lebih baik.¹⁸

Penelitian di atas menunjukkan bahwa untuk menjadi pemimpin, perempuan harus meningkatkan kemampuannya dengan meningkatkan kualitas sumber daya, pengetahuan, kecerdasan, dan keberanian untuk menunjukkan kualitas yang khas. Sebagai pemimpin, perempuan seharusnya membawa kepentingan perempuan melalui berbagai pilihan kebijakan guna meningkatkan kualitasnya. Salah satunya dapat dilakukan melalui strategi peningkatan angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan salah satu alat untuk menilai kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Terdapat penelitian dari Uni Sari, Harianto, dan A Faroby Falatehan (2016) dengan judul "*Strategi Meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) Melalui Alokasi Anggaran Kesehatan Di Provinsi Jawa Barat*". Penelitian Sari, Harianto dan Falatehan ini membuat strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan AHH melalui alokasi anggaran kesehatan. Dengan menggunakan analisis SWOT terhadap faktor internal dan eksternal, terdapat beberapa faktor yang menguntungkan dan merugikan, serta beberapa faktor ancaman dan peluang yang dapat diidentifikasi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan terkait rencana yang kerjasama antara Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan pihak swasta adalah bekerjasama dengan rumah sakit swasta untuk memberikan pelayanan kepada pasien Jamkesmas dan melakukan beberapa kegiatan, seperti

¹⁸ Alvionita, Vivi. (2017). Gender dan Kepemimpinan Pemerintahan di Kabupaten (Studi Kasus pada Kepemimpinan Bupati Chusnunia Chalim di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016). *Skripsi*. Universitas Lampung.

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit swasta kepada pasien Jamkesmas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa mempertimbangkan prioritas dan waktu pelaksanaan untuk menyusun strategi lain yang telah dikembangkan.¹⁹

Dari penelitian-penelitian yang telah diuraikan, belum ada penelitian yang meneliti bagaimana pemimpin perempuan membuat kebijakan khusus dalam meningkatkan angka harapan hidup, mengingat hal tersebut merupakan salah satu alat untuk menilai kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam bagaimana kinerja kepemimpinan Sri Sumarni dalam meningkatkan angka harapan di Kabupaten Grobogan.

1.5.2 Kerangka Teori

1.5.2.1 Kepala Daerah

Pasal 3 ayat (2) UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah kabupaten disebut bupati, dan kotamadya disebut walikota. Dalam melaksanakan pemerintahan di suatu daerah, pemimpin daerah tentunya memiliki hal-hal yang harus diperhatikan, bahkan menjadi prioritas dalam proses pelaksanaannya yaitu tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah.

¹⁹ Sari, Uni., Harianto, dan A Faroby Falatehan. (2016). Strategi Meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) Melalui Alokasi Anggaran Kesehatan di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Vol. 8, No.1.*

Menurut Pasal 25 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan Perda;
- c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban yaitu:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
- f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahandaerah;
- g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Dalam menjalankan otonomi daerah, kepala daerah harus mengemban tanggung jawab dan kewajiban lain dari kepala daerah. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi juga tergantung pada kemampuan pemimpin daerah dalam membimbing, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, peran pemimpin dalam organisasi sangat penting, sehingga kepemimpinan disebut sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

1.5.2.2 Konsep Gender dan Jenis Kelamin

Robert Stoller adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah “gender”. Hal ini dilakukan untuk membedakan pencirian manusia yang didasarkan pada sosial budaya ataupun berasal dari ciri-ciri fisik dan biologis.²⁰ Selanjutnya, Ann Oakley menjelaskan bahwa gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. Artinya, gender merupakan *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang.²¹ Definisi Gender juga telah dijelaskan dalam peraturan pemerintah Indonesia, yaitu berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 2000, gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari waktu ke waktu. Sekalipun demikian, ada dua elemen gender yang bersifat universal, yaitu: Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari waktu ke waktu. Sekalipun demikian, ada dua elemen gender yang bersifat universal, yaitu:²²

1. jenis kelamin tidak identik dengan gender

²⁰ Nugroho, Riant D. (2008). Gender dan Strategi Pengarusutamaanannya di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm.2.

²¹ Ibid. Hlm.3.

²² Ibid. Hlm.6.

2. Gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat.

Disimpulkan bahwa gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu atau zaman, suku, ras, atau bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, ideologi negara, politik, hukum, dan ekonomi. Oleh karenanya, gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat relatif. Perbedaan gender dengan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2.
Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin

No.	Gender	Jenis Kelamin
1.	Buatan manusia	Ciptaan Tuhan
2.	Bukan kodrat	Merupakan suatu kodrat
3.	Dapat diubah	Tidak dapat diubah
4.	Dapat dipertukarkan	Tidak dapat dipertukarkan
5.	Tergantung pada waktu	Zaman
6.	Tergantung budaya setempat	Berlaku dimana saja

Penelitian ini melihat Sri Sumarni sebagai kepala daerah berdasarkan konsep gender, bukan jenis kelamin. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana Sri Sumarni dalam menerapkan pengarusutamaan gender terkait kebijakan yang ia keluarkan serta pembelanjaan daerah sebagai salah satu tugas dan fungsi kepala daerah dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Grobogan pada periode 2016 – 2021.

1.5.2.3 Pengarusutamaan Gender

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilaksanakan secara rasional dan

sistematis guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia dengan kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari semua kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dalam Inpres tersebut seluruh jajaran eksekutif yakni, Gubernur, Bupati, Walikota harus melakukan PUG dalam semua tahapan pembangunan.²³

PUG adalah strategi untuk menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program dalam semua sektor pembangunan sudah memperhitungkan dimensi atau aspek gender yakni melihat laki-laki dan perempuan sebagai pelaku (subjek dan objek) yang setara dalam akses, partisipasi, kontrol atas pembangunan, dan memanfaatkan hasil pembangunan.

Tujuan pengarusutamaan gender yaitu memastikan apakah perempuan dan laki - laki:

- mendapatkan akses yang sama atas sumberdaya pembangunan.
- ikut serta yang sama dalam proses pembangunan. Termasuk proses pengambilan keputusan.
- memiliki kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan.

²³ Soeparman, Surjadi. (2006). Mengapa Gendermainstreaming Menjadi Aksi Nasional?. *Jurnal Perempuan Edisi 50*, Hlm.35.

- mendapatkan manfaat yang sama dari hasil pembangunan.²⁴

Penyelenggaraan pangarusutamaan gender meliputi baik pemenuhan kebutuhan praktis gender ataupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender yaitu kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan dan/atau laki-laki untuk menjalankan peran-peran sosial masing - masing, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, serta pemberantasan buta aksara. Kebutuhan strategis gender yaitu kebutuhan perempuan dan/atau laki-laki yang berhubungan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan/atau laki-laki, seperti perubahan di dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya. Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan deskriminasi di berbagai bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama, dan lainnya.²⁵

Berdasarkan buku Panduan Pelaksanaan Inpres No 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, yang dibuat oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, menyatakan bahwa sejumlah kondisi awal yang diperlukan dalam rangka menyelenggarakan pengarusutamaan gender :

²⁴ Wiasti, Ni Made.(2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). *Dalam Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, Hlm.37.

²⁵ Ibid.Hlm. 37.

1. *Political will* dan kepemimpinan dari lembaga dan pemimpin eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Adanya kesadaran, kepekaan, dan respons, serta motivasi yang kuat guna mendukung terciptanya keadilan dan kesetaraan gender.
2. Adanya kerangka kebijakan yang secara jelas menyatakan komitmen pemerintah, provinsi, kabupaten/kota terhadap perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
3. Struktur dan mekanisme pemerintah, provinsi, kabupaten/kota yang mengintegrasikan perspektif gender.
4. Sistem Informasi dan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin.
5. Alat analisis : perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
6. Dorongan dari masyarakat madani kepada pemerintah.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam tiap tahap pembangunan khususnya dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan agar kepentingan perempuan dan laki-laki dapat tertampung, sehingga keduanya dapat merasakan hasil pembangunan secara seimbang. Penelitian ini akan lebih menfokuskan diri kepada dua hal dari proses pengarusutamaan gender yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan belanja daerah.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Sebelum membahas metode penelitian, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai istilah kunci dari konsep yang digunakan untuk mempertegas, memberikan arah dan menghindari kesalahpahaman, adalah sebagai berikut:

1.6.1 Kepala Daerah dalam Penerapan Pengarusutamaan Gender

Kepala Daerah dalam melaksanakan pemerintahan di suatu daerah memiliki hal-hal yang harus diperhatikan, bahkan menjadi prioritas dalam proses pelaksanaannya yaitu tugas, wewenang dan kewajiban. Penelitian ini melihat Sri Sumarni sebagai kepala daerah berdasarkan konsep gender, bukan jenis kelamin. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, Kepala Daerah harus melaksanakan PUG dalam semua tahapan pembangunan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari semua kebijakan dan program di semua sektor pembangunan memperhatikan aspek gender, yaitu laki-laki dan perempuan diperlakukan sebagai aktor (subjek dan objek) yang setara dalam akses, partisipasi, mengontrol pembangunan dan memanfaatkan hasil pembangunan.

Dalam proses penyelenggaraan pengarusutamaan gender, penelitian ini akan lebih memfokuskan diri kepada dua hal dari proses pengarusutamaan gender yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan belanja daerah. Penelitian ini akan melihat bagaimana Sri Sumarni dalam menerapkan pengarusutamaan gender terkait kebijakan yang ia keluarkan serta pembelanjaan daerah sebagai salah satu tugas dan fungsi kepala daerah dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Grobogan pada periode 2016 – 2021.

1.7 Metoda Penelitian

Menurut Sugiyono, “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Berdasarkan hal tersebut, empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu metode ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.²⁶ Menurut Darmadi, “Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu”.²⁷ Cara ilmiah berarti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan metode ilmiah dalam memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Sebagai instrumen, peneliti harus memiliki teori dan wawasan yang luas agar dapat bertanya, menganalisis, memotret, dan membangun lingkungan sosial yang lebih jelas dan bermakna. Menurut Sugiyono, menjelaskan bahwa:

“Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif,

²⁶ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta. Hlm. 2.

²⁷ Darmadi, Hamid. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung : Alfabeta. Hlm. 153.

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.”²⁸

Menurut I Made Winartha, metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena analisis datanya berupa ungkapan tertulis atau lisan dengan memperhatikan pandangan orang lain yang dapat disebut sebagai narasumber.²⁹

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian yaitu tempat dimana seharusnya penelitian menangkap objek dari yang diteliti. Situs dari penelitian ini adalah para informan yang memiliki sumber informasi dalam kaitannya dengan kebijakan meningkatkan angka harapan hidup di Kabupaten Grobogan.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada dasarnya adalah subjek yang terikat pada kesimpulan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian biasanya disebut informan. Informan adalah orang-orang yang dipercaya oleh peneliti sebagai narasumber atau sumber informasi, dan mereka akan memberikan

²⁸ Sugiyono. (2010) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta. Hlm.15.

²⁹ I Made Winartha. (2006). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta : Andi. Hlm. 155.

informasi yang akurat untuk melengkapi data penelitian. Hal tersebut juga dipaparkan oleh Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D bahwa: “Informan adalah sebutan bagi sampel dari penelitian kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian”.³⁰

Informan memberikan data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Tanpa Informan, peneliti tidak akan bisa mendapatkan hasil atau inti dari penelitian. Informan juga harus berbentuk *adjective* karena akan mempengaruhi valid atau tidaknya data yang diteliti dan juga akan mempengaruhi keabsahan data yang diteliti. Berikut daftar informan di dalam penelitian ini :

Tabel 1.3
Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Hj. Sri Sumarni, SH., MM.	Bupati Grobogan periode 2016-2021
2.	Dr. Ir. Mohammad Sumarsono, M.Si.	Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
3.	Anang Armunanto, S.Sos, M.Si.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Grobogan
4.	Indartiningsih, S.Sos.	Kepala Dinas BP3AKB Kabupaten Grobogan

1.7.4 Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Noeng Muhadjir menyebutkan bahwa Data kualitatif, yaitu data yang

³⁰ Sugiyono. (2010) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta. Hlm.216.

disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.³¹ Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi keadaan informan serta pelaksanaan kebijakan pemerintah Grobogan yang berkaitan dengan strategi meningkatkan angka harapan hidup.

1.7.5 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif menyebutkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³² Namun untuk melengkapi data penelitian diperlukan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan pengambilan data dengan menggunakan instrumen wawancara, pencatatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³³ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah Bupati Grobogan, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Kepala BAPPEDA Kabupaten Grobogan, dan Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Grobogan.

³¹ Noeng Muhadjir. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin : Yogyakarta. Hlm. 2.

³² Moleong, Lexy J.. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hlm. 157.

³³ Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung : Alfabeta. Hlm. 187.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk menunjang data primer yaitu melalui penelitian pustaka, literatur, buku, majalah, surat kabar, dan arsip tertulis yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.³⁴ Sumber data sekunder ini akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan menganalisis hasil penelitian ini, sehingga dapat meningkatkan hasil penelitiandan menghasilkan penelitian yang memiliki tingkat validitas yang tinggi.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara yang digunakan dalam metode penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Tanpa penguasaan teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitiannya. Menurut Suwarma mengatakan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan berbagai cara.³⁵ Berikut ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Wawancara

³⁴ Ibid.Hlm,187.

³⁵ Al Muchtar, Suwarma. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Mandiri. Hlm. 255.

Wawancara terjadi dimana peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan untuk menggali informasi melalui pertanyaan dan menggunakan teknik tertentu. “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dua orang, pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban”.³⁶ Dalam Suwarma Al Muchtar mengatakan bahwa langkah-langkah wawancara adalah sebagai berikut

:³⁷

- 1) Membuat kisi-kisi untuk mengembangkan kategori yang akan memberikan gambaran siapa orang yang tepat mengungkapkannya.
- 2) Menetapkan informan kunci.
- 3) Membuat pedoman wawancara.
- 4) Menghubungi dan melakukan perjanjian wawancara.
- 5) Mengawali atau membuka alur wawancara.
- 6) Melaksanakan alur wawancara dan mencatat pokok atau merekam pembicaraan.
- 7) Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
- 8) Menuangkan hasil wawancara kedalam catatan lapangan.
- 9) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

Dalam penelitian ini subjek wawancara adalah Bupati Grobogan, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Kepala BAPPEDA Kabupaten

³⁶ Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 186.

³⁷ Al Muchtar, Suwarma. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Mandiri. Hlm. 272-276.

Grobogan, dan Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Grobogan. Peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian untuk mendapatkan data yang cukup sebagai *cross check* untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen yang ada dan mendukung data penelitian. “Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis”.³⁸ Dalam Suwarma mengatakan bahwa hal - hal yang perlu diperhatikan dalam studi dokumentasi yaitu:³⁹

- 1) Peneliti mengidentifikasi jenis dokumen apa yang diperlukan untuk dijadikan fokus kajian.
- 2) Peneliti memastikan bahwa dokumen merupakan bukti yang berkait erat dengan fokus penelitian.
- 3) Peneliti meyakini bahwa dalam dokumen merupakan sumber informasi berkait dengan fokus penelitian.
- 4) Peneliti merumuskan sejumlah pertanyaan dan hipotesis untuk melakukan *inquiry* secara mendalam guna memperkuat penafsiran dalam menemukan informasi bermakna bagi pemecahan masalah dan membangun teori sebagai hasil penelitian.

³⁸ Bungin & Burhan. (2008). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Prenada Media Group. Hlm. 122.

³⁹ Al Muchtar, Suwarma. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Mandiri. Hlm. 165-266.

- 5) Peneliti memastikan bahwa dokumen tersebut asli original dan atau autentik berkaitan erat dengan masalah penelitian.
- 6) Peneliti membuat catatan hasil studi dokumentasi secara bertahap.

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan dan arsip-arsip lain dari program kerja khususnya dalam meningkatkan angka harapan hidup di Kabupaten Grobogan.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum dan sesudah masuk lapangan. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, yang terdiri dari empat hal utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴⁰ Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, kemudian menggunakan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dll untuk dicatat dalam catatan lapangan. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa

⁴⁰ Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung : Alfabeta. Hlm. 334.

informan yaitu Bupati Grobogan, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Kepala BAPPEDA Kabupaten Grobogan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dan Kepala Dinas BP3AKB Kabupaten Grobogan.

2) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan yang berfokus pada langkah- langkah penyederhanaan, abstrak, dan transformasi data asli yang dihasilkan dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membuat koding hasil wawancara dengan tujuan untuk menyeleksi data. Selain itu juga merangkum hasil koding wawancara dan menghapus bagian- bagian yang tidak penting sehingga dihasilkan gambaran yang fokus tentang pokok penelitian.

3) Penyajian Data

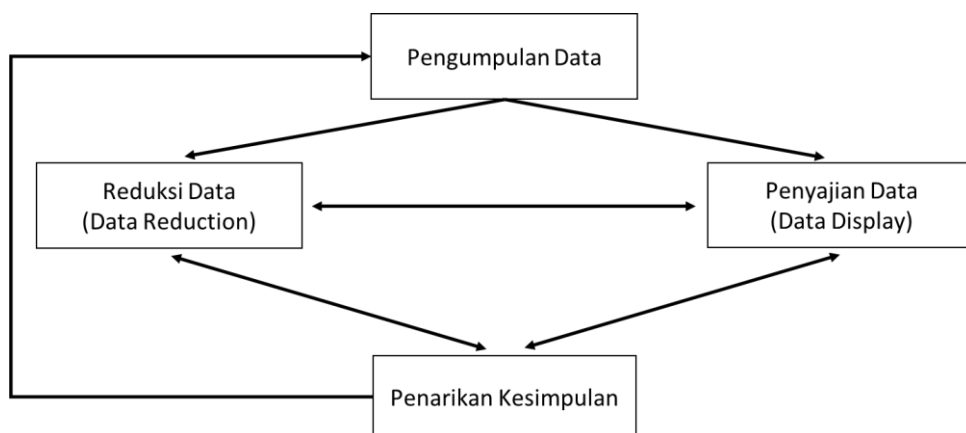
Penyajian data dirancang untuk memudahkan peneliti dalam melihat hasil penelitian. Dikarenakan hasil penelitian masih berupa data - data yang berdiri sendiri, maka banyaknya data yang diperoleh membuat peneliti kesulitan untuk melihat gambaran hasil penelitian dan proses pengambilan kesimpulan. Kemudian hasil reduksi data yang telah diselesaikan oleh peneliti di atas disajikan dalam bentuk data deskriptif dan analisis hasil penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini menyusun informasi - informasi mengenai kinerja kepemimpinan Bupati Sri Sumarni dalam meningkatkan angka harapan hidup.

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai langkah terakhir dalam menyusun laporan atau menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan melihat hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum yang obyektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah gambaran dari objek yang awalnya belum jelas, sehingga tampak kinerja kinerja kepemimpinan Bupati Sri Sumarni dalam meningkatkan angka harapan hidup.

Skematis analisis data dengan model interaktif oleh Milles dan Huberman digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.8
Model Analisis Interaktif Milles dan Huberman



Bagan mengenai teknik analisis tersebut menunjukkan bahwa proses pengumpulan data dan proses menganalisis data dapat dilaksanakan bersama-sama. Proses-proses analisis yang dimaksud mencakup Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

1.7.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Peneliti menggunakan kriteria kredibilitas untuk menentukan kualitas data dalam penelitian ini. Guna membuktikan bahwa data yang diperoleh benar dan pasti, peneliti memastikan keabsahan data penelitian dengan mencantumkan bahan referensi berupa foto dan rekaman wawancara.